

PENGINTEGRASIAN KELOMPOK TANI DI DALAM PENINGKATAN KWANTITAS DAN KWALITAS KEANGGOTAAN BUUD/KUD *

*(The integration of farmer group in improving the membership of BUUD/KUD
BUUD/KUD)*

Soedarsono Hadisapoetro.

1. Pendahuluan

Sudah sejak semula difikirkan, agar pembinaan BUUD/KUD dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap rehabilitasi, tahap konsolidasi dan tahap pengembangan.

Di dalam tahap rehabilitasi maka pembinaan diarahkan agar BUUD/KUD mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi secara nyata, yang dirasakan bermanfaat oleh masyarakat.

Jika eksistensi BUUD/KUD telah diakui oleh masyarakat maka seharusnya pembinaan diarahkan untuk menjadikan BUUD/KUD suatu organisasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (Tahap Konsolidasi)

Terdorong oleh keinginan Pemerintah untuk memanfaatkan koperasi sebagai alat untuk memperlakukan hasil-hasil pembangunan maka justru tahap konsolidasi ini diabaikan, dan pembinaan diloncatkan dari tahap rehabilitasi terus ke dalam tahap pengembangan, di mana tugas-tugas tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu organisasinya, tugas-tugas BUUD/KUD di dalam membantu melaksanakan program-program pembangunan selalu ditambah dan diperberat.

Itulah sebabnya BUUD/KUD kerap kali dianggap sebagai aparat Pemerintah dan bekerja untuk kepentingan Pemerintah, sedangkan partisipasi masyarakat dan pengawasan masyarakat masih sangat terbatas yang selanjutnya menimbulkan kekecewaan - kekecewaan dan mendorong terjadinya penyelewengan-penyelewengan.

Berhubung dengan itu maka tahap konsolidasi perlu ditangani secara lebih serius berdasarkan konsepsi yang lebih mantap.

Dalam hubungan ini, maka peningkatan kuantitas dan kualitas keanggotaan BUUD/KUD merupakan salah satu langkah yang sangat penting.

* Kertas kerja pada Lokakarya "Cara-cara Peningkatan Anggota Koperasi" Jakarta 14 - 20 Oktober 1977.

Untuk menjadikan BUUD/KUD suatu organisasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka peningkatan kuantitas dan kualitas keanggotaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Meningkatnya jumlah anggota BUUD/KUD hanya akan berarti meningkatnya dukungan masyarakat terhadap organisasinya, jika disertai dengan makin meningkatnya partisipasi anggota di dalam rapat-rapat anggota, dan makin meningkatnya jumlah uang simpanan serta makin meningkatnya pengawasan terhadap organisasinya, sehingga usaha-usaha BUUD/KUD dapat berjalan lancar, sedang penyelewengan tidak terjadi lagi.

Keadaan tersebut hanya akan dicapai jika meningkatnya jumlah anggota terjadi secara sukarela, yang dilandasi keinsafan bahwa menjadi anggota koperasi akan memberi manfaat baginya pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Ini berarti, bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas keanggotaan BUUD/KUD harus dilaksanakan dengan penyuluhan dan penerangan secara intensif yang disertai dengan langkah-langkah yang nyata yang dapat membuktikan bahwa kegiatan-kegiatan BUUD/KUD dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip koperasi yang memberi manfaat bagi para anggotanya. Dalam hubungan itu, maka untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas keanggotaan BUUD/KUD pemanfaatan kelompok-kelompok tani yang sekarang sedang dibina oleh Departemen Pertanian dan kemudian mengintegrasikan kelompok-kelompok tersebut di dalam BUUD/KUD dianggap merupakan konsepsi yang paling wajar.

Melalui kelompok-kelompok tani tersebut penyuluhan dan penerangan mengenai perkoperasian dapat diberikan secara lebih intensif dan mendalam. Melalui kelompok-kelompok tani maka pelayanan kepada petani dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Melalui kelompok-kelompok tani itu pula partisipasi anggota dapat disalurkan secara teratur dan dapat ditingkatkan mutunya secara mantap.

Yang menjadi persoalan sekarang ialah bagaimanakah caranya untuk memanfaatkan kelompok-kelompok tani itu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan penyuluhan dan perbaikan pelayanan dan kemudian bagaimanakah caranya untuk mengintegrasikannya ke dalam BUUD/KUD.

Sebelum dapat menjawab persoalan-persoalan tersebut ada baiknya jika terlebih dahulu ditinjau secara singkat tentang arti, dan dasar-dasar pengelompokan masyarakat tani di pedesaan yang sekarang dikembangkan oleh Departemen Pertanian.

2. Arti pengelompokan masyarakat tani di pedesaan

Ide pertama yang mendorong terbentuknya kelompok-kelompok tani di pedesaan timbul karena adanya keinginan untuk memprogresifkan

penyuluhan pertanian, sehingga para petani dan keluarganya yang berjumlah jutaan itu dapat terjangkau dengan efektif dan efisien oleh Korps Penyuluh Pertanian yang terbatas jumlahnya.

Seperti telah diketahui maka penyuluhan pertanian merupakan sistem pendidikan di luar sekolah untuk para petani dan keluarganya dengan tujuan agar mereka mampu dan bersedia serta berswadaya untuk bertani lebih baik dan mencapai tingkat usaha tani yang lebih efisien dan lebih produktif serta untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dari pada keluarganya dan masyarakat yang lebih memuaskan.

Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan pertanian, maka kegiatan penyuluhan diusahakan untuk dipertinggi efektivitasnya dengan diadakannya kegiatan - kegiatan di bidang penyediaan kredit, penyediaan sarana produksi dan kegiatan untuk memperlancar pengolahan dan pemasaran hasil.

Di dalam rangka pelaksanaan program bimbingan massal (Bimas) maka kegiatan penyuluhan dikaitkan dengan kegiatan penyediaan kredit, kegiatan penyediaan sarana dan kegiatan pengolahan serta pemasaran hasil di dalam suatu wilayah Unit Desa yang meliputi lebih kurang 600 - 1000 ha.

Pada waktu sekarang kegiatan penyuluhan di dalam wilayah Unit Desa dipertanggung jawabkan kepada seorang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), penyediaan kredit diserahkan kepada BRI-Unit Desa, dan kegiatan penyediaan sarana, pengolahan dan pemasaran hasil diserahkan kepada BUUD/KUD.

Dalam jangka panjangnya diharapkan semua kegiatan tersebut di atas dapat dijalankan oleh BUUD/KUD yang merupakan organisasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Di dalam membina penyuluhan pertanian, kebijaksanaan Pemerintah pada waktu sekarang diarahkan untuk mempersatukan pembinaan penyuluhan di dalam satu tangan.

Berdasarkan kebijaksanaan itu maka pembinaan penyuluhan pertanian, yang dulu ditugaskan kepada tiap-tiap Direktorat Jendral, pada waktu sekarang dipusatkan pada badan baru yang di tingkat Departemen Pertanian dinamakan Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian (BPLPT).

Di tingkat wilayah Unit Desa maka konsolidasi penyuluhan pertanian diarahkan untuk memusatkan kegiatan penyuluhan yang tadinya dijalankan oleh beberapa petugas yang masing-masing secara terpisah-pisah melayani peternakan, perikanan, perkebunan dan pertanaman pangan, kepada suatu Badan Penyuluh Pertanian Lapangan yang bersifat polyvalen.

Di dalam melaksanakan tugasnya maka Badan ini dilengkapi dengan seorang atau beberapa Penyuluh Pertanian Lapangan yang dibimbing oleh Penyuluh Pertanian Madya.

Untuk memperlancar jalannya penyuluhan maka diperlukan berbagai-bagai peralatan yang berupa Balai Penyuluhan Pertanian pada tiap-tiap 10 Wilud, Pusat Informasi Pertanian di tingkat Propinsi, yang dilengkapi dengan alat-alat peraga, alat-alat pengangkutan dan pembiayaan yang memadai.

Untuk menghadapi 1500 - 4000 petani yang ada pada tiap-tiap Wilud maka para Penyuluh Pertanian Lapangan memerlukan partner atau teman yang dapat membantu tugas-tugas penyuluhan di pedesaan, karena jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan berdasarkan budget dan efisiensi selalu terbatas jumlahnya.

Di sinilah timbul keinginan untuk mengadakan pengelompokan masyarakat tani di dalam kelompok-kelompok kecil di bawah pimpinan seorang petani-pemimpin (kontak tani, patani maju) yang secara sukarela bersedia dan mampu membantu PPL untuk memberi petunjuk-petunjuk serta contoh-contoh kepada teman-teman petani yang ada di sekitarnya.

Melalui pemimpin kelompok-kelompok tani kecil itu, diharapkan dapat diadakan komunikasi yang lebih lancar antara PPL dengan masyarakat tani, Di dalam kelompok-kelompok itu diharapkan pula dapat diadakan hubungan dan saling pengertian di antara para petani secara lebih wajar dan efektif serta dapat diadakan usaha bersama yang sesuai dengan keadaan dan keinginan para anggota. Dengan adanya kelompok kecil ini juga dapat ditimbulkan kecenderungan yang lebih besar dari pada para anggota untuk mengikuti keputusan bersama yang positif, yang dapat membawa mereka pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Dipandang dari sudut Pemerintah maka dengan diadakannya kelompok-kelompok tani tersebut, diharapkan penyuluhan yang diberikan oleh petugas penyuluhan yang terbatas jumlahnya dapat mencapai petani dalam jumlah yang lebih besar dengan hasil yang cukup intensif. Dengan demikian maka melalui kelompok-kelompok tani dapat diadakan penyuluhan yang relatif murah tetapi dengan hasil yang cukup efektif dan efisien.

Berdasarkan atas cara berfikir di atas, maka berbagai-bagai Dinas berusaha untuk mendorong terbentuknya kelompok-kelompok tani yang kiranya akan dapat membantu memperlancar dan meng-efektifkan tugas-tugas yang menjadi tanggung-jawabnya.

Dengan demikian timbul kelompok-kelompok tani seperti misalnya Kelompok Pendengar, Kelompok Pirsawan, Kelompok Tani Dewasa, Kelompok Tani Tebu Rakyat Intensifikasi, Kelompok Tani Pemakai Air, Kelompok Pemberantas Hama, yang dasar pembentukannya berbeda-beda.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah tidak perlu diadakan penyederhanaan di dalam pembentukan kelompok-kelompok tani tersebut, mengingat bahwa di dalam prakteknya kelompok-kelompok itu kerap kali

menimbulkan kesimpang siuran di dalam pelaksanaan tugas dan menyebabkan pemborosan tenaga dan pikiran di dalam pembinaannya.

Persoalan penyederhanaan tersebut juga timbul karena sudah sejak permulaan tahun 1975, Pemerintah telah menentukan kebijaksanaan untuk memusatkan pembinaan penyuluhan pertanian di dalam satu tangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah Unit Desa seperti telah diutarakan di atas.

Kegiatan Penyuluh Pertanian Lapangan yang bersifat polyvalen diarahkan untuk dapat memberikan penyuluhan pada petani di dalam turut memecahkan segala persoalan yang bersangkutan dengan usaha taninya dan di dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya. Jikalau dikehendaki penyederhaan, kiranya dasar-dasar apakah yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan itu ?

3. Dasar - dasar Pengorganisasian Petani

12. Seperti telah diuraikan di atas maka dasar dan cara pembentukan kelompok tani sampai sekarang masih sangat beraneka ragam.

Ada yang didasarkan atas adanya suatu alat yang dipergunakan sebagai alat pengikat dari organisasi itu. Dasar ini dipergunakan di dalam pembentukan Kelompok Pendengar dan Kelompok Pirsawan. Ada yang dasarnya keserasian dalam arti mempunyai pandangan, kepentingan dan kesenangan yang sama, misalnya Kelompok Tani Dewasa atau Himpunan Tani. Ada yang mempunyai dasar lokasi tanah usaha taninya misalnya Kelompok Tani Pemakai Air di mana petani itu dikelompokkan menurut letak tanah usaha taninya yang bersama-sama memperoleh pengairan dari saluran yang sama. Contoh lain misalnya Kelompok Tani Tebu Rakyat Intensifikasi di mana petani itu dikelompokkan karena tanah usaha taninya yang lokasinya pada suatu tempat bersama-sama ditanami dengan tebu.

Ada yang didasarkan atas kedudukan fungsionalnya di dalam masyarakat, misalnya Kelompok Tani Wanita, Kelompok Tani Taruna/Taruni.

13. Untuk mengadakan penyederhanaan di dalam pembentukan kelompok-kelompok tani, maka dipikirkan untuk mengarahkan pengelompokan masyarakat tani di dalam rangka pembangunan pertanian di dalam dua kelompok saja, yaitu :

- 1). Kelompok lapangan, yaitu kelompok petani yang lokasi tanah usaha taninya berada dalam satu hamparan tertentu.
Jadi ikatan dalam kelompok ini berpangkal pada kesamaan lokasi tanah usaha taninya.
- 2) Kelompok tetangga, atau kelompok domisili yaitu suatu kelompok tani yang lokasi tempat tinggalnya berdekatan satu sama lain.
Jadi ikatan dalam kelompok ini berpangkal pada persamaan lokasi tempat tinggal (domisili).

Kelompok lapangan terdiri daripada petani-petani yang mengusahakan tanah usaha tani yang bersama - sama terletak pada suatu hamparan yang pola usaha-taninya kurang lebih sama, yang memperoleh pengairan dari sumber yang sama (jika ada), dan di mana komunikasi antar petani di hamparan itu cukup mudah.

Kelompok tetangga (atau kelompok domisili) terdiri daripada petani-petani yang bertempat tinggal bersama-sama di dalam satu kompleks yang meliputi jumlah petani 20 - 30 orang.

Pada dasarnya tiap-tiap petani dapat menjadi anggota dua kelompok tersebut di atas. Seorang petani dapat menjadi anggota kelompok lapangan dan sekaligus menjadi anggota kelompok tetangga.

Kedua kelompok tersebut di atas dapat dipergunakan oleh berbagai-bagai instansi untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya dengan tidak mengurangi arti atau fungsi anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu.

Kelompok mana yang akan dipergunakan, dapat disesuaikan dengan tujuan dan sifat daripada kegiatan yang akan dilakukan, misalnya kegiatan penyuluhan melalui radio atau melalui TV dapat dijalankan dengan memanfaatkan kelompok tetangga yang dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan. Dengan demikian alat ini merupakan alat penyuluhan dan bukan alat pengikat.

Penyuluhan yang harus disertai dengan kegiatan-kegiatan di lapangan misalnya penyuluhan mengenai Tebu Rakyat Intensifikasi, penyuluhan mengenai pemberantasan hama dan penyakit, dapat disalurkan melalui kelompok lapangan. Penyuluhan-penyuluhan semacam itu akan menjadi kurang efektif bila disalurkan melalui kelompok tetangga, karena ada kemungkinan petani-petani yang menjadi anggota kelompok tetangga itu lokasi tanah usaha taninya terpencar-pencar di beberapa tempat.

4. Organisasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan Metoda latihan dan Kunjungan

Untuk meningkatkan dan mengintensifkan penyuluhan kepada petani, maka sejak tahun yang lalu (1976) Departemen Pertanian mengintrodusir penyuluhan pertanian metoda latihan dan kunjungan (LAKU), di mana PPL secara teratur mengadakan kunjungan kepada para petani untuk memberikan latihan guna meningkatkan pengetahuan dan ke-trampilan para petani. Di samping itu kesempatan kunjungan itu dipergunakan pula untuk memberikan berbagai informasi yang diperlukan oleh para petani dan untuk membantu petani di dalam memecahkan berbagai masalah yang mereka hadapi.

Tetapi karena terbatasnya jumlah PPL yang ada dan besarnya jumlah petani yang harus dihadapi maka metoda LAKU tersebut

terpaksa dijalankan secara bertingkat yaitu melalui kelompok - kelompok tani.

Secara teratur pula PPL mendapatkan latihan untuk dapat mengikuti perkembangan pengetahuan, sehingga menguasai pengetahuan mutakhir dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani.

Di dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan metode LAKU itu, maka diadakan pengelompokan kembali daripada masyarakat tani yang ada di dalam Wilud.

Untuk tahap pertama pengelompokan kembali itu didasarkan atas persamaan lokasi tanah usaha tani (kelompok hamparan). Pada tahap berikutnya akan diadakan penyederhanaan juga di dalam pengelompokan domisili.

Atas dasar kemampuan membimbing dari seorang penyuluh maka tiap-tiap Wilud dibagi di dalam 16 Wilayah Kelompok (Wilkel).

Tiap-tiap Wilkel meliputi suatu hamparan tanah pertanian yang luasnya antara 40 - 60 ha, di mana pola usaha taninya kurang lebih sama. Petani-petani di dalam satu Wilkel yang jumlahnya berkisar antara 100 - 300 orang diorganisir di dalam satu kelompok yang disebut Kelompok Tani.

Kepengurusan Kelompok Tani terdiri dari Ketua dan Sekretaris yang dipilih secara langsung oleh para petani anggota atau oleh para petani maju yang memimpin kelompok-kelompok bulak dan kelompok-kelompok kegiatan yang ada di dalam Wilkel yang bersangkutan.

Di dalam tiap-tiap Kelompok Tani dapat diadakan kelompok-kelompok kegiatan sesuai dengan kebutuhan seperti Organisasi Petani Pemakai Air, Regu Pemberantasan Hama, Kelompok-Kelompok Bulak dan sebagainya yang masing-masing biasanya di pimpin oleh seorang petani-maju.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Kontak Tani Ketua Kelompok Tani dibantu oleh 15 - 20 orang petani-maju yang memimpin Kelompok-Kelompok Kegiatan atau Kelompok-Kelompok Bulak yang terdiri dari 5 - 10 orang petani.

Dengan cara pengelompokan seperti diuraikan di atas, maka seorang PPL membina 16 Kontak Tani Ketua Kelompok Tani, dan seorang Kontak Tani Ketua Kelompok Tani membina 15 - 20 Petani Maju Ketua Kelompok Kegiatan, sedang seorang Petani Maju membimbing 5 - 10 orang petani pengikut.

Di tiap-tiap Wilkel diusahakan adanya sebuah gubug yang dipergunakan untuk mengadakan pertemuan lapangan antara PPL dengan

Kontak Tani Ketua Kelompok Tani dan Petani Maju, antara Kontak Tani Ketua Kelompok Tani dengan Petani Maju dan para Petani.

Gubug itu dibangun di hamparan tempat kerja para petani, yang semata-mata untuk mendapat tempat yang teduh waktu mengadakan pertemuan disela-sela waktu kerjanya. Pertemuan itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pekerjaan masing - masing, misalnya pada saat-saat mereka sedang beristirahat.

Pada waktu-waktu tidak ada kegiatan lapangan, pertemuan dapat diatur di tempat-tempat lain, yang telah disetujui bersama.

Tiap - tiap dua minggu sekali pada hari-hari yang sudah ditentukan dengan pasti, secara teratur PPL mengunjungi pertemuan antar Kontak Tani Ketua Kelompok Tani dengan para Petani Maju di gubugnya, di mana PPL mempunyai kesempatan untuk mengajarkan ketrampilan dan pengetahuan baru, atau menyampaikan informasi-informasi yang diperlukan atau membantu petani di dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, di samping mengumpulkan masalah-masalah lain yang perlu dicarikan pemecahannya.

Di dalam hal PPL belum mampu atau belum tahu cara memecahkan masalah yang dihadapi oleh petani, PPL meneruskan masalah tersebut kepada fihak - fihak yang menurut fungsinya mempunyai kewajiban menyelesaikan masalah tersebut seperti misalnya masalah saprodi kepada Mantri Tani atau BUUD, masalah kredit kepada BRI-Unit Desa, masalah kebijaksanaan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, masalah teknologi kepada PPM/PPS.

Untuk meneruskan masalah - masalah tersebut, maka PPL dapat secara khusus menemui fihak-fihak yang bersangkutan secara langsung atau di dalam rapat-rapat Dinas yang mereka kunjungi pada tiap-tiap dua minggu sekali.

Di tiap Wilayah yang meliputi sekitar 10 Wilud didirikan sebuah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang dipimpin oleh seorang Penyuluh Pertanian Madya (PPM).

Dengan peralatan yang ada di dalam BPP dan dibantu oleh PPS, maka PPM mempunyai kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan para PPL di wilayah - kerjanya melalui kunjungan sekurang-kurangnya satu bulan sekali di tiap - tiap Wilud dan mengadakan rapat kerja atau latihan kerja tiap-tiap dua minggu sekali dengan para PPL.

Dalam pertemuan tersebut yang harinya sudah ditentukan, maka instansi - instansi lain dapat turut menghadirinya untuk bersama-sama memecahkan masalah - masalah yang diajukan oleh PPL atau untuk menyampaikan pesan-pesan yang dapat dibantu oleh PPL untuk disampaikan kepada para petani.

Di dalam pertemuan itu juga diadakan latihan-latihan untuk menambah pengetahuan PPL yang diselenggarakan oleh PPS.

Demikianlah secara singkat organisasi dan pedoman kerja pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan metoda LAKU yang sekarang sedang dikembangkan oleh Departemen Pertanian di tiap-tiap Wilud di seluruh Indonesia.

5. Pemanfaatan dan Pengintegrasian kelompok Tani di dalam Peningkatan Kwantitas dan Kualitas Keanggotaan BUUD/KUD.

Dengan mengetahui organisasi dan pedoman kerja pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan metoda LAKU tersebut, kiranya akan lebih mudah untuk menyusun langkah-langkah yang konkrit untuk memanfaatkan Kelompok-Kelompok Tani tersebut untuk kepentingan penyuluhan dan perbaikan pelayanan oleh BUUD/KUD kepada masyarakat tani dengan tujuan untuk meningkatkan kwantitas dan kualitas keanggotaan BUUD/KUD.

Prinsip tersebut didasarkan atas suatu pemikiran bahwa di dalam usaha meningkatkan kwantitas dan kualitas keanggotaannya, BUUD/KUD tidak perlu membentuk kelompok-kelompok tani baru tetapi akan memanfaatkan apa yang sudah ada untuk menghindari kesimpangsiuran dan kebingungan masyarakat.

Dengan bekerja-sama dengan PPL, maka petugas Direktorat Jendral Koperasi dan pengurus BUUD/KUD di dalam Wilud yang bersangkutan dapat memberikan penyuluhan pada waktu kunjungan berkala PPL pada pertemuan Kontak Tani Ketua Kelompok Tani dengan para Petani Maju di dalam tiap-tiap Wilkel.

Pada pertemuan itu di samping diberikan penyuluhan mengenai perkoperasian pada umumnya dan mengenai pentingnya keanggotaan petani di dalam BUUD/KUD pada khususnya, maka supaya dapat ditampung pula sebanyak mungkin keinginan dan usul usul yang menuju kearah penyempurnaan usaha-usaha BUUD/KUD.

Sambil mengadakan penyuluhan secara bergilir pada tiap-tiap Wilkel maka diadakan perbaikan pelayanan BUUD/KUD kepada para petani misalnya dengan mendirikan kios-kios yang dapat melayani 3 sampai 4 Wilkel. Penyelenggaraan kios itu mungkin dapat diserahkan pada Pengurus Wilkel yang bersangkutan. Kios itu tidak hanya menyalurkan sarana produksi, tetapi mungkin barang-barang konsumsi yang diperlukan petani setempat. Pada waktu-waktu panen, kios itu supaya dapat menampung pembelian gabah/beras dari petani dengan harga-dasar yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Dengan diadakannya penyuluhan tersebut yang disertai dengan perbaikan pelayanan BUUD/KUD melalui Kios - Kios yang tersebar-sebar, maka diharapkan pertama-tama para Kontak Tani dan Petani

Maju secara sukarela akan menjadi anggota BUUD/KUD dan secara berangsur-angsur disusul oleh para petani lainnya.

Rapat-rapat anggota sudah mulai diadakan dengan mengundang Kontak-Kontak Tani dan Petani-Petani Maju saja yang dianggap mewakili pula para petani yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan atau Kelompok Bulak.

Rapat-rapat anggota tersebut supaya dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang diarahkan untuk memperbaiki usaha dan organisasi BUUD/KUD.

Jika sebagian besar daripada petani dalam tiap-tiap Kelompok Petani secara sukarela menjadi anggota BUUD / KUD dan telah menginsafi akan manfaatnya, maka Kelompok Tani tersebut di samping merupakan Kelompok penyuluhan, dapat menyatakan diri sebagai Himpunan Tani yang merupakan kelompok anggota BUUD/KUD di dalam Wilkel-Wikkel.

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan perkembangan BUUD/KUD, maka hubungan antara Kelompok-Kelompok Tani disatu fihak dengan BUUD/KUD di lain fihak dapat mempunyai 2 sifat yaitu :

- 1). Hubungan yang bersifat sebagai hubungan kerja, di mana kegiatan BUUD / KUD, seperti penyaluran peralatan, penyaluran sarana produksi, pemasaran hasil dan sebagainya dilakukan melalui kelompok-kelompok tersebut yang dipusatkan pada beberapa kios-kios tertentu.
- 2). Hubungan yang bersifat organisatoris, di mana Kelompok-Kelompok Tani tersebut oleh BUUD/KUD ditunjuk sebagai kelompok anggota, yang di dalam rapat anggota diwakili oleh Kontak Tani Ketua Kelompok Tani dengan Petani-petani Maju yang merupakan Ketua dari Kelompok-Kelompok Kegiatan dan Kelompok-Kelompok Bulak. Suara yang dibawa adalah sebanyak jumlah anggota BUUD/KUD yang ada di dalam Kelompok itu masing-masing.

Tujuan, kebijaksanaan dan prosedur kerja seperti diuraikan di atas sebaiknya dijadikan putusan bersama antara Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja dan Transkop serta Menteri Dalam Negeri untuk di-instruksikan pelaksanaannya kepada para Gupernur Ketua Badan Pembina Bimas ditiap-tiap propinsi.